**IMPLEMENTASI PENYULUHAN HUKUM SEBAGAI UPAYA
PENGUATAN KESADARAN MASYARAKAT TERHADAP
PENCEGAHAN DEFORESTASI DI DAERAH KONSERVASI (STUDI
PENELITIAN KPH RONGKONG)**

**Adrian Riski Hermawan¹, Ugie Adirestu²,
Andi Almunir³, Nasrah Hasmiati Attas⁴**
Universitas Mega Buana Palopo^{1,2,3,4}

Email: adrianriski890@gmail.com¹, ugieadirestu@gmail.com²,
andialmunir7@gmail.com³, nasrah.hasmiati@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penyuluhan hukum dalam pencegahan deforestasi di Desa Kalotok, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung yang dikelola oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong. Konversi lahan hutan menjadi area pertanian, khususnya budidaya padi, menyebabkan deforestasi dan degradasi lingkungan yang mengancam keberlanjutan ekosistem. Di sisi lain, penyuluhan hukum bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap dampak lingkungan dan hukum dari praktik konversi lahan hutan yang tidak terkendali. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara semi-terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun penyuluhan hukum oleh KPH Rongkong telah dilakukan dengan berbagai metode, tingkat kesadaran hukum masyarakat masih tergolong rendah, terutama di kalangan kelompok usia produktif. Faktor penghambat utama dalam implementasi penyuluhan hukum mencakup ketidaksesuaian peraturan perundang-undangan, sikap apatis masyarakat, dan keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KPH Rongkong. Meskipun demikian, terdapat perkembangan positif dalam hal penurunan tingkat pelanggaran, meskipun praktik konversi lahan masih tetap terjadi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya pendekatan penyuluhan hukum yang lebih interaktif, partisipatif, serta dukungan lebih lanjut dari pemerintah daerah untuk memperkuat implementasi kebijakan perlindungan hutan yang berkelanjutan.

Kata Kunci : Penyuluhan Hukum, Deforestasi, KPH Rongkong

Abstract

This study aims to evaluate the effectiveness of legal counseling in preventing deforestation in Kalotok Village, Sabbang Selatan District, North Luwu Regency, which is part of the protected forest area managed by the Forest Management Unit (KPH) Rongkong. The conversion of forest land into agricultural areas, particularly for rice cultivation, has led to deforestation and environmental degradation, threatening the sustainability of the ecosystem. On the other hand, legal counseling seeks to raise community awareness of the environmental and legal impacts of uncontrolled forest land conversion practices. The method used in

this study is a descriptive qualitative approach, with data collection through semi-structured interviews and documentation. The results show that although legal counseling by KPH Rongkong has been conducted using various methods, the level of legal awareness in the community remains low, particularly among the productive age group. The main obstacles to the implementation of legal counseling include the inconsistency of regulations, community apathy, and the limited resources available to KPH Rongkong. Nevertheless, there has been positive progress in terms of the reduction of violations, although land conversion practices still persist. This study recommends the need for a more interactive and participatory approach to legal counseling, as well as further support from the local government to strengthen the implementation of sustainable forest protection policies.

Keywords: *Legal Counseling, Deforestation, KPH Rongkong*

Pendahuluan

Desa Kalotok, yang terletak di Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, merupakan wilayah yang sebagian besar didominasi oleh hutan lindung. Hutan ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem serta menjadi sumber penghidupan bagi masyarakat lokal. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, terjadi peningkatan konversi lahan hutan menjadi area pertanian, khususnya untuk budidaya padi. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran terkait deforestasi dan degradasi lingkungan di kawasan tersebut.

Konversi lahan hutan menjadi lahan pertanian seringkali dipicu oleh kebutuhan ekonomi masyarakat setempat. Meskipun pertanian padi memberikan manfaat ekonomi jangka pendek, praktik ini dapat mengancam keberlanjutan hutan lindung dan fungsi ekologisnya. Selain itu, perubahan penggunaan lahan tanpa perencanaan yang matang dapat menyebabkan penurunan kualitas tanah, hilangnya keanekaragaman hayati, dan peningkatan risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor.

Perubahan pola penggunaan lahan tidak hanya berdampak pada ekosistem, tetapi juga pada struktur sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu fenomena yang muncul akibat konversi lahan hutan menjadi pertanian adalah meningkatnya *konsumtivisme* di kalangan masyarakat lokal. *Konsumtivisme* mengacu pada pola hidup yang cenderung berorientasi pada konsumsi barang dan jasa, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan primer tetapi juga sekunder dan tersier (Bauman, 2007). Dalam konteks ini, pergeseran ekonomi dari pola pertanian subsisten ke pertanian komersial menciptakan ketergantungan yang lebih besar pada pasar dan meningkatkan kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang konsumtif.

Secara *das sein*, masyarakat yang sebelumnya mengandalkan pertanian subsisten untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri kini lebih berorientasi pada keuntungan ekonomi dari hasil pertanian komoditas. Pendapatan dari pertanian komersial sering kali dialokasikan untuk membeli barang konsumtif, yang pada akhirnya mendorong eksploitasi sumber daya alam lebih lanjut. Misalnya, peningkatan pendapatan mendorong peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor, penggunaan pupuk dan pestisida kimia dalam jumlah besar, serta ekspansi lahan

pertanian tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Akibatnya, siklus deforestasi terus berlanjut karena kebutuhan akan lahan baru semakin meningkat.

Sementara itu, dalam perspektif *das sollen*, idealnya pola ekonomi yang berkembang di masyarakat tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perhutanan Sosial, seharusnya menjadi pedoman bagi masyarakat dan pemerintah dalam mengelola sumber daya alam. Dalam hal ini, penyuluhan hukum memiliki peran strategis dalam mengedukasi masyarakat agar memahami konsekuensi hukum dan lingkungan dari tindakan mereka. Dengan meningkatkan kesadaran hukum, diharapkan masyarakat dapat menyeimbangkan kebutuhan ekonomi dengan upaya pelestarian hutan, sehingga praktik konversi lahan dapat dikendalikan tanpa mengorbankan keberlanjutan ekosistem.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai regulasi untuk melindungi hutan dan mencegah deforestasi, seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Namun, implementasi di tingkat lokal seringkali menghadapi berbagai tantangan, termasuk kurangnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat dan lemahnya penegakan hukum. Dalam konteks ini, peran penyuluhan hukum menjadi krusial sebagai upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya konservasi hutan.

Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong merupakan unit pelaksana teknis di bawah Dinas Kehutanan yang bertanggung jawab atas pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Salah satu tugas utama KPH Rongkong adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat sekitar hutan, termasuk di Desa Kalotok. Penyuluhan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan deforestasi.

Namun, meskipun sudah banyak kasus deforestasi yang terjadi di Desa Kalotok, pemerintah melalui program Perhutanan Sosial, termasuk pemberian Izin Pengelolaan Barang Hutan (PBPH), telah memberikan alternatif legal bagi masyarakat untuk mengelola hutan. Izin PBPH ini memberikan akses kepada masyarakat untuk mengelola lahan hutan secara sah, dengan harapan dapat mencegah praktik pengelolaan lahan yang merusak lingkungan. Meskipun demikian, tantangan implementasi pengelolaan yang berkelanjutan masih tetap ada, terutama dengan adanya kecenderungan pola pikir yang lebih mengutamakan keuntungan ekonomi jangka pendek.

Masyarakat yang sudah memperoleh izin PBPH sering kali masih menghadapi kesulitan dalam mengelola lahan sesuai dengan prinsip keberlanjutan, mengingat perubahan sosial dan ekonomi yang terjadi di tingkat lokal. Selain itu, meskipun telah ada regulasi dan izin legal, kurangnya pemahaman mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap lingkungan sering kali menjadi kendala. Dengan demikian, efektivitas penyuluhan hukum di lapangan menjadi sangat penting untuk membangun kesadaran masyarakat dan mendorong perilaku yang lebih bertanggung jawab dalam menjaga kawasan konservasi hutan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi penyuluhan hukum oleh KPH Rongkong dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat terhadap pencegahan deforestasi di Desa Kalotok, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi tersebut.

Metodologi

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalotok, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara, dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan fenomena sosial yang terjadi, khususnya terkait dengan efektivitas penyuluhan hukum dan pengelolaan hutan di wilayah tersebut. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari dokumentasi dan wawancara semi-terstruktur. Dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang relevan, sementara wawancara semi-terstruktur dilakukan untuk memperoleh informasi langsung dari informan mengenai berbagai aspek yang berkaitan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yang dimulai dengan proses transkripsi wawancara, diikuti dengan identifikasi tema-tema utama yang relevan dengan tujuan penelitian. Data selanjutnya dikelompokkan dalam kategori-kategori yang mencakup kesadaran hukum, hambatan dalam penyuluhan, serta faktor sosial-ekonomi yang mempengaruhi perilaku masyarakat terkait pengelolaan hutan. Pemilihan informan dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yang memilih informan berdasarkan kriteria tertentu, seperti keterlibatannya dalam pengelolaan hutan dan penyuluhan hukum. Metode yang digunakan merujuk pada pendekatan kualitatif yang dijelaskan oleh Creswell (2014) dalam *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.

Pembahasan

A. Implementasi penyuluhan hukum pencegahan deforestasi di kawasan konservasi KPH Rongkong

Deforestasi memiliki dampak yang signifikan terhadap keseimbangan ekosistem global dan perubahan iklim. Dari perspektif ekologis, deforestasi menyebabkan hilangnya habitat alami bagi berbagai spesies, menurunkan keanekaragaman hayati, serta merusak kualitas tanah dan cadangan air yang esensial untuk kelangsungan hidup banyak organisme. Selain itu, deforestasi yang tidak terkendali dapat memperburuk risiko bencana alam seperti banjir dan tanah longsor (Brown & Pearce, 2017). Di tingkat lokal, seperti yang terlihat di Desa Kalotok, konversi lahan hutan menjadi area pertanian semakin memperburuk tekanan terhadap sumber daya alam yang terbatas. Penelitian yang dilakukan oleh Nurdin et al. (2018) di Provinsi Riau menunjukkan bahwa sosialisasi mengenai pencegahan kebakaran hutan dan lahan dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian hutan. Namun, efektivitas penyuluhan ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti metode yang digunakan, frekuensi pelaksanaan, dan tingkat partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan yang diselenggarakan.

Kesadaran hukum masyarakat Desa Kalotok terhadap penyuluhan hukum pencegahan deforestasi masih tergolong rendah, terutama di kalangan kelompok

usia produktif. Sebagian besar dari mereka belum sepenuhnya memahami dampak negatif dari konversi lahan hutan, baik dari segi hukum maupun ekologi. Kurangnya pemahaman ini diperburuk oleh terbatasnya akses informasi dan pendidikan hukum, serta pandangan bahwa praktik konversi tersebut tidak akan membawa dampak yang signifikan bagi mereka. Selain itu, ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap hasil pertanian, yang mendorong mereka untuk terus membuka lahan hutan, juga menjadi faktor yang memperburuk kondisi ini. Penelitian yang dilakukan oleh Amir et al. (2022) di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara, mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi penyuluhan hukum. Beberapa tantangan tersebut antara lain keterbatasan jumlah tenaga penyuluh serta fasilitas pendukung yang tidak memadai, serta kendala sosial dan budaya, seperti tradisi lokal yang tidak selaras dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Terdapat perbedaan tingkat kesadaran hukum di antara kelompok masyarakat di Desa Kalotok. Berdasarkan usia, perbedaan ini dapat dilihat dari tingkat pelanggaran yang ditemukan, di mana pelaku yang terlibat rata-rata berusia antara 25 hingga 60 tahun. Sementara itu, jika dilihat berdasarkan profesi, sulit untuk memastikan keterkaitan profesi dengan tingkat pelanggaran, karena dalam beberapa kasus pelanggaran tersebut terjadi akibat adanya dukungan dari oknum penegak hukum atau individu dari profesi lainnya. Dukungan Pemerintah Daerah Luwu Utara, melalui dinas terkait, terhadap penyuluhan yang dilaksanakan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong sangat besar. Pemda juga memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Satgas PKHL), yang berperan dalam mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan serta memberikan bantuan logistik selama patroli. Dukungan ini sangat penting, mengingat kolaborasi yang efektif antara pemerintah daerah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan perlindungan kawasan hutan yang lebih berkelanjutan. Penelitian oleh Mutawalli et al. (2022) menekankan bahwa konsistensi dalam kebijakan dan keterlibatan negara sangat penting dalam upaya mengatasi deforestasi, melalui penerapan kebijakan yang solutif serta mekanisme penegakan hukum yang efektif.

Penyuluhan hukum yang dilakukan oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Rongkong dilakukan melalui berbagai saluran, antara lain melalui penyuluhan langsung saat patroli oleh Polisi Kehutanan, kegiatan pemberdayaan masyarakat, serta forum-forum pertemuan yang melibatkan masyarakat. Dalam kegiatan patroli, Polisi Kehutanan tidak hanya berfungsi sebagai pengawas kawasan hutan, tetapi juga sebagai penyampai informasi hukum mengenai pengelolaan hutan dan dampak negatif yang ditimbulkan oleh konversi lahan hutan yang tidak terkontrol. Selain itu, KPH Rongkong juga memanfaatkan platform media sosial sebagai sarana untuk menyebarkan informasi hukum secara lebih luas dan efektif, terutama kepada masyarakat yang sulit dijangkau secara langsung. Namun demikian, tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memastikan bahwa penyuluhan ini dapat bersifat lebih interaktif dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Sintya Wulan (2022) menunjukkan bahwa pendekatan penyuluhan hukum yang lebih interaktif dan partisipatif dapat meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat. Pendekatan seperti diskusi

kelompok, simulasi, dan penggunaan media lokal yang lebih familiar bagi masyarakat terbukti lebih efektif dalam menyampaikan pesan-pesan hukum terkait dengan pencegahan deforestasi.

Evaluasi terhadap respons masyarakat terhadap penyuluhan hukum dilakukan dengan memantau pelanggaran yang terjadi selama periode tertentu. Berdasarkan data patroli yang dilaksanakan oleh Polisi Kehutanan, teridentifikasi adanya penurunan signifikan dalam tingkat pelanggaran. Meskipun demikian, kontribusi langsung dari penyuluhan dalam menurunkan tingkat pelanggaran tersebut sulit untuk diukur. Penurunan ini mengindikasikan adanya perubahan sikap di kalangan masyarakat, meskipun praktik konversi lahan belum sepenuhnya hilang. Untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai efektivitas penyuluhan, diperlukan survei lebih lanjut atau wawancara dengan masyarakat guna menggali lebih dalam pemahaman mereka tentang pentingnya pelestarian hutan serta konsekuensi hukum dari pelanggaran yang terjadi. Evaluasi berbasis bukti yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses evaluasi dapat memberikan informasi yang lebih komprehensif mengenai dampak penyuluhan dan area-area yang masih memerlukan perbaikan. Selain itu, Pemerintah Daerah Luwu Utara, melalui dinas terkait, memberikan dukungan yang signifikan terhadap kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh KPH Rongkong. Pemda juga turut memfasilitasi pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, yang berperan penting dalam mendukung upaya pencegahan kebakaran hutan serta memberikan bantuan logistik selama patroli. Dukungan dari pemerintah daerah ini sangat vital, mengingat kolaborasi antara pemerintah, lembaga terkait, dan masyarakat menjadi kunci dalam mencapai tujuan perlindungan kawasan hutan yang berkelanjutan.

Meskipun penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh KPH Rongkong menunjukkan perkembangan yang positif, beberapa tantangan tetap mengemuka. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh KPH Rongkong, terutama dalam hal jumlah tenaga penyuluh dan alat pendukung yang diperlukan untuk melaksanakan penyuluhan secara lebih intensif dan menyeluruh. Selain itu, faktor sosial dan budaya juga menjadi hambatan signifikan dalam mencapai keberhasilan penyuluhan hukum. Beberapa kelompok masyarakat masih memegang teguh tradisi lama dalam mengelola hutan, yang tidak selalu sejalan dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Ketergantungan pada praktik-praktik tradisional ini kadang kala menghambat upaya pelestarian hutan yang berkelanjutan, karena cara-cara tersebut belum tentu mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ekosistem hutan.

B. Faktor penghambat implementasi Penyuluhan Hukum pencegahan deforestasi di kawasan konservasi KPH Rongkong

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Fitra Yanto R, S.Hut, selaku Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat, terdapat beberapa faktor yang menghambat implementasi penyuluhan hukum terkait pencegahan deforestasi di kawasan konservasi KPH Rongkong. Faktor pertama yang menjadi penghambat di lapangan, sering kali ditemukan ketidaksesuaian atau pertentangan antara ketentuan dalam peraturan yang satu dengan yang lainnya. Sebagai contoh, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan mengatur tentang perlindungan hutan dan kawasan hutan, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbuatan manusia, kebakaran, dan hama. Namun, terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan dalam Pasal 38 dari undang-undang yang sama, yang mengizinkan penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan, termasuk kegiatan pertambangan, selama tidak mengubah fungsi utama kawasan hutan tersebut. Ketidaksesuaian antara kedua pasal ini menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan perlindungan hutan di lapangan.

Perlindungan hutan dan kawasan hutan diatur sebagai usaha yang bertujuan untuk:

- a. mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk perbuatan manusia, aktivitas ternak, kebakaran, daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. mempertahankan serta menjaga hak-hak negara, masyarakat, dan individu terhadap hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi, serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan mengatur mengenai penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan, yang hanya dapat dilakukan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung. Ketentuan tersebut dijabarkan dalam beberapa ayat, di antaranya:

- 1) Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan non-kehutanan hanya diperbolehkan di kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung;
- 2) Penggunaan kawasan hutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan tanpa mengubah fungsi pokok kawasan hutan;
- 3) Penggunaan kawasan hutan dilakukan melalui pinjam pakai oleh Pemerintah Pusat, dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan; dan
- 4) Di kawasan hutan lindung, penambangan dengan pola pertambangan terbuka dilarang.

Kedua pasal tersebut di atas mencerminkan ketidaksesuaian yang signifikan. Pasal 47 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengamanatkan perlindungan dan pelestarian hutan serta kawasan hutan, dengan tujuan untuk mencegah kerusakan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, di sisi lain, Pasal 38 mengatur bahwa kawasan hutan dapat digunakan untuk kegiatan pembangunan non-kehutanan, termasuk kegiatan pertambangan, sepanjang tidak mengubah fungsi pokok kawasan hutan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan ketegangan antara upaya perlindungan hutan yang tercantum dalam Pasal 47 dan potensi eksploitasi sumber daya alam yang diatur dalam Pasal 38, sehingga menciptakan tantangan dalam implementasi kebijakan pengelolaan hutan yang konsisten dan berkelanjutan.

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi penyuluhan hukum adalah perilaku masyarakat. Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan, mengingat terkadang masyarakat menunjukkan sikap apatis, tidak mendukung, atau bahkan tidak sadar hukum serta tidak patuh terhadap peraturan yang ada. Hal ini terutama terjadi di wilayah kawasan hutan yang telah mengalami keterlanjuran dalam pengelolaan oleh oknum masyarakat, termasuk klaim atas suatu wilayah sebagai

hutan adat. Klaim tersebut sering kali dilakukan oleh masyarakat adat tertentu yang merasa memiliki hak atas kawasan tersebut. Meskipun hingga saat ini resistensi terhadap penyuluhan hukum belum tampak secara langsung atau terbuka, sikap apatis dan tidak mendukung dari sebagian oknum masyarakat seringkali terasa secara tidak langsung. Sikap ini menghambat keberhasilan penyuluhan hukum, karena tidak ada dukungan penuh dari masyarakat untuk melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan pelestarian hutan.

Jika angka deforestasi terus meningkat setiap tahunnya, hal ini dapat menimbulkan dampak serius terhadap lingkungan, yang tidak hanya merugikan ekosistem hutan dan makhluk hidup yang bergantung padanya, tetapi juga berdampak pada masyarakat yang tinggal di kawasan perkotaan. Dampak-dampak negatif tersebut antara lain berupa bencana alam, seperti banjir, serta perubahan iklim yang lebih parah. Perubahan iklim ini terjadi akibat hilangnya pohon-pohon di hutan yang berperan sebagai penyerap dan penyimpan karbon dioksida, yang kemudian dikonversi menjadi oksigen melalui proses fotosintesis. Dengan berkurangnya populasi pohon, maka karbon dioksida yang diserap oleh pohon-pohon tersebut akan dilepaskan kembali ke atmosfer, bersama dengan gas-gas rumah kaca lainnya, yang memperburuk pemanasan global dan perubahan iklim.

Upaya Pengurangan Deforestasi

Menurut Fitra Yanto R, S.Hut., Kepala Seksi Perlindungan Hutan dan Pemberdayaan Masyarakat yang bertugas di KPH Rongkong, deforestasi tidak dapat sepenuhnya dicegah, namun dapat diperlambat atau dihambat melalui penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan di berbagai desa. Selain itu, KPH Rongkong juga bekerja sama dengan organisasi internasional, seperti Flora dan Fauna Internasional, yang memiliki tujuan yang sama dalam upaya pencegahan kerusakan lingkungan dan deforestasi. Kerja sama ini diharapkan dapat memperkuat upaya konservasi dan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Angka deforestasi yang terus meningkat setiap tahunnya, apabila tidak segera diatasi dengan upaya pengurangan yang efektif, akan menyebabkan hilangnya lahan hutan secara besar-besaran. Kehilangan lahan hutan ini akan diikuti dengan hilangnya habitat alami satwa, tumbuhan, serta berbagai makhluk hidup yang bergantung pada ekosistem tersebut. Deforestasi merupakan masalah lingkungan yang kompleks dan sulit diatasi, sehingga untuk menguranginya diperlukan kolaborasi yang erat antara berbagai pihak, baik pemerintah, masyarakat, maupun organisasi terkait. Kerja sama ini penting untuk mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam mengurangi kegiatan yang merusak lingkungan serta mendukung program-program yang dapat mengatasi permasalahan deforestasi secara komprehensif (Forest Watch Indonesia, 2020). Jika laju deforestasi dapat dikurangi, maka pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) akan lebih terwujud, karena upaya pengurangan deforestasi berkontribusi dalam melindungi ekosistem daratan yang vital bagi kelangsungan hidup berbagai spesies dan manusia.

Adapun berbagai upaya yang dapat dilakukan yaitu diantaranya sebagai berikut:

- **Melakukan Penebangan dengan Sistem Tebang Pilih**

Tebang pilih merupakan salah satu sistem silvikultur yang diterapkan untuk pengelolaan hutan hujan tropis di Indonesia. Sistem ini dirancang untuk mengatur praktik penebangan pohon agar tidak dilakukan secara sembarangan, dengan tujuan untuk memastikan keberlanjutan hutan. Penerapan sistem tebang pilih ini dianggap sebagai upaya untuk melestarikan hutan, karena dapat mengurangi penebangan pohon secara liar dalam jumlah besar, sekaligus menjaga kelestarian ekosistem hutan yang lebih luas. Dengan demikian, sistem ini membantu memastikan bahwa kegiatan penebangan dilakukan secara selektif, memperhatikan aspek keberlanjutan dan pemulihan hutan.

- **Reboisasi**

Reboisasi, atau penghijauan, adalah proses penanaman kembali pohon-pohon di area hutan yang telah gundul akibat aktivitas manusia, dengan tujuan untuk mengembalikan fungsi ekologis hutan tersebut. Melalui reboisasi, hutan yang telah rusak dapat dipulihkan, sehingga kelestariannya dapat terjaga. Proses ini tidak hanya mendukung pemulihan vegetasi, tetapi juga berkontribusi pada pemulihan kualitas tanah, peningkatan biodiversitas, serta penyediaan layanan ekosistem yang penting bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.

- **Melakukan Penebangan secara Konservatif**

Penebangan secara konservatif merupakan metode penebangan yang dilakukan dengan memilih pohon-pohon yang sudah tidak produktif lagi. Dalam pelaksanaannya, penebangan harus dilakukan secara selektif, dengan mempertimbangkan usia dan kondisi pohon yang akan ditebang. Pohon-pohon yang telah mencapai usia tua atau rapuh, yang tidak lagi memberikan manfaat ekologis atau ekonomi yang signifikan, menjadi prioritas utama untuk ditebang. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan kerusakan terhadap ekosistem hutan, sambil memastikan bahwa pohon-pohon yang masih vital dan produktif tetap dilindungi untuk mendukung kelangsungan fungsi ekologis hutan.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Peningkatan angka deforestasi yang terus terjadi setiap tahun memiliki dampak yang signifikan terhadap lingkungan, termasuk hilangnya habitat satwa dan kerusakan ekosistem. Upaya pengurangan deforestasi perlu dilakukan dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, serta memperkuat kerja sama antar lembaga, baik pemerintah maupun organisasi internasional.
2. Penebangan hutan yang dilakukan secara konservatif, seperti sistem tebang pilih, reboisasi, dan penebangan pohon yang sudah tidak produktif lagi, merupakan langkah penting untuk melestarikan hutan dan mengurangi kerusakan yang lebih besar. Meskipun demikian, peraturan yang kontradiktif perlu diperbaiki untuk mendukung upaya ini.

B. Saran

Penting untuk meningkatkan penyuluhan hukum dan sosialisasi tentang dampak deforestasi kepada masyarakat, serta mendorong partisipasi aktif dalam program konservasi hutan yang berkelanjutan. Revisi dan harmonisasi peraturan terkait pengelolaan hutan sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang mendukung pelestarian hutan, sambil meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amir, Muh. Asriani. Takdir, La Ode. 2022. *Strategi Pemerintah Dalam Mencegah Illegal Logging Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara*. Jurnal Publicuho. Universitas Halu Oleo. Kendari
- Attas, N. H., Hasmiati Attas, N., Nasir, C., Eka Saputra, T., & Gilang, A. (2022). Realizing restorative justice through mediation. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research*, 2(2), 243–248. <https://doi.org/10.59065/jissr.v2i2.143>
- (IEEE): H. Wahyuni, and S. Suranto, *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*, *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, vol. 6, no. 1, pp. 148-162, Mar. 2021.
- [BBKSDA] Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistem. 2008. *Laporan Evaluasi Fungsi Kawasan Cagar Alam Kamojang dan Taman Wisata Alam Kawah Kamojang*. Bandung.
- Arif, A. (2016). *Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan*. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum*, 3(1), 33-41
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (4th ed.). Sage Publications.
- Dari, Freti Sintya Wulan. 2022. *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pencegahan Pembakaran Hutan*. De Cive (Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan). Jawa Timur
- Daulat Rakyat. *Panen Penangkaran Benih Padi di Desa Kalotok Capai 8,4 Ton*. Diakses pada laman <https://daulatrakyat.id/panen-penangkaran-benih-padi-di-desa-kalotok-capai-84-ton/> tanggal 2 Februari 2025 Pukul 13.00 Wita.
- Eriyati, E., & Rosyetti, R. (2017). *Faktor-Faktor Penyebab Deforestasi Hutan Di Provinsi Riau*.
- Fernando Richard, Prof. Dr. Marsudi Triatmodjo, S.H., LL.M. 2009. *Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Dalam Implementasi REDD (Reducing Emissions From Deforestation And Degradation-Pengurangan Emisi Dari Deforestasi Dan Degradasi) Bagi Hutan Di Indonesia*. Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Fukuyama, F. (2013). *Political order and political decay From the industrial revolution to the globalization of democracy*. Farrar, Straus and Giroux.
- Hakim L., Setiawati B., Hawing H., & Lestari I. (2023). *Resiliensi Masyarakat dan Penyuluhan Pasca Banjir di Kecamatan Masamba Kabupaten Luwu Utara: Community Resilience and Post-Flood Counseling in Masamba District, North Luwu Regency*. *Jurnal Penyuluhan*, 19(02), 220-231
- Ichsan, Nursyamsi, Nasir, Citra, Attas, Nasrah Hasmiati, Eka Saputra, Tri. 2022. *Empowering Community Legal Awareness in The Utilization of Mining Natural Resources and Environmental Protection*. *Journal of Indonesian Scholars for Social Research* 2(2), (205-214)
- Manurung, Arifin A. R., et al. *Peranan Kebijakan Negara terhadap Perlindungan Hutan untuk Menekan Laju Deforestasi Taman Nasional Tesso Nilo*. *Jurnal*

- Online Mahasiswa Fakultas Pertanian Universitas Riau*, vol. 2, no. 1, Feb. 2015, pp. 1-11
- Mutawalli, Muhammad. 2023. *Penegakan Hukum Deforestasi: Upaya Perbaikan Dan Penanganannya Di Indonesia*. STAIN Majene. Sulawesi Barat
- Nakita, C., & Najicha, F. U. (2022). Pengaruh deforestasi dan upaya menjaga kelestarian hutan di Indonesia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 6(1), 92-103.
- Siswadi, I., & Supriadi, S. (2024). *Implementasi Hukum Lingkungan dalam Konversi Lahan: Perspektif Sosiologi Hukum (Deforestasi, Konsumtisme, dan Pertanian Jagung di Bima)*. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 7(2), 754-763.
- Sunderlin, W. D., & Resosudarmo, I. A. P. (1997). *Laju dan penyebab deforestasi di Indonesia: penelaahan kerancuan dan penyelesaiannya*. Centre for International Forestry Research.
- Susilawati. D. 2008. *Analisis dampak dan faktor yang mempengaruhi perambahan hutan (studi kasus : Desa Bulu Hadek, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Simeulue, Nangroe Aceh Darussalam)*. Skripsi Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Susiyanti, A. Emilia, Setyani Hilda. Kamal, Ubaidillah. 2024. *Penegakan Hukum Terhadap Kebakaran Hutan Guna Mengurangi Permasalahan Lingkungan Hidup di Indonesia*. Media Hukum Indonesia. Yayasan Daarul Huda Kruengmane. Banda Aceh
- Wahyuni, H., & Suranto, S. (2021). *Dampak Deforestasi Hutan Skala Besar terhadap Pemanasan Global di Indonesia*. *JIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6 (1):148-162.